



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

FENDY RONNY LENGKEY TTL /Tenga,22 Agustus 1980, Umur 42 Tahun, Agama Kristen,Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Tenga Jaga III,Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa selatan;

ALVIAN LUKAR TTL /Pakuweru,03 Agustus 1961, Umur 42 Tahun, Agama Kristen,Jenis Kelamin Perempuan,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Desa Tenga Jaga III,Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa selatan;

Selanjutnya, keduanya Suami Istri disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon; Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 15 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 20 September 2022 dibawah register Nomor 132/Pdt.P/2022/PN Amr dan isi Permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama **VENNA JEKLIN LENGKEY** yang lahir di Tenga pada tanggal 07 April 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 332/CSMS/Disp/Khs/2008;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih

Halaman 1 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Amr



berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya di izinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak-Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **VENNA JEKLIN LENGKEY** ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan Perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk di masukan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ; Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **VENNA JEKLIN LENGKEY**;
Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat-surat berupa:

1. **P-1** : Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 45/*6/2003 dikeluarkan di Tenga Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa pada tanggal 30 Juni 2003 antara LENGKEY VENDY RONNY dengan LUKAR ALFIANA SILVANA NONA;
2. **P-2** : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 332/CSMS/DISP/KHS/2008 dikeluarkan di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Selatan pada tanggal 3 Maret 2008 atas nama
VENNA JEKLIN LENGKEY;

3. **P-3** : Fotokopi Kartu Keluarga No.7105090809080706
dikeluarkan tanggal 14 April 2021 Nama Kepala Keluarga
FENDY RONNY LENGKEY;
4. **P-4** : Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Tengah
tanggal 10 Mei 2021 atas nama VENNA JEKLIN LENGKEY;
5. **P-5** : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7105092208800001
dikeluarkan tanggal 10 Januari 2018, atas nama FENDY
LENGKEY;
6. **P-6** : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7172064308810002
dikeluarkan tanggal 01 Februari 2018, atas nama ALFIANI
LUKAR;
7. **P-7** : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7105094704040001
dikeluarkan tanggal 28 April 2021, atas nama VENNA
JEKLIN LENGKEY;
8. **P-8** : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7105025703050002
dikeluarkan tanggal 13 Juli 2022, atas nama VENNA JEKLIN
LENGKEY;
9. **P-9** : Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor:
140/05/546/VIII- 2022 tertanggal 29 Agustus 2022 atas
nama VENNA JEKLIN LENGKEY;
10. **P-10** : Asli Surat Keterangan Calon Pengantin Pemerintah
Kabupaten Minahasa Selatan Dinas Kesehatan Puskesmas
UPTD Puskesmas Tengah Nomor: 001/7076/PKM-
Tga/IX/2022 tanggal 02 September 2022, atas nama Venna
Lengkey;
11. **P-11** : Fotocopy Surat Pengakuan bersama tertanggal 12
September 2022 atas nama VENNA JEKLIN LENGKEY;
12. **P-12** : Asli Surat Ijin Orang Tua ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-10
telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya
telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **JOSEF I PONTOH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah dan hendak menikahkan anak mereka yang bernama VENNA JEKLIN LENGKEY;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon memiliki seorang anak yaitu Anak VENNA JEKLIN LENGKEY;
- Bahwa Anak berumur 18 (delapan belas) Tahun dan hendak dinikahkan dengan RIAN YEHEZKIEL DAUD LINTONG karena Anak sekarang dalam keadaan sudah hamil 6 (Enam) bulan dari RIAN YEHEZKIEL DAUD LINTONG;
- Bahwa RIAN YEHEZKIEL DAUD LINTONG berusia 21 (dua puluh satu) Tahun dan bekerja sebagai petani yang berpenghasilan mencukupi untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Anak telah tamat Sekolah Menengah Pertama dan akan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa RIAN YEHEZKIEL DAUD LINTONG dan Anak berpacaran sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat mengingat usia kehamilan Anak;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan yang akan dilangsungkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara Anak dan Calon Suaminya dan tidak ada yang keberatan;

2. **MARTHINA MAGRIETY MARSELA REMBET** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah dan hendak menikahkan anak mereka yang bernama VENNA JEKLIN LENGKEY;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon memiliki seorang anak yaitu Anak VENNA JEKLIN LENGKEY;
- Bahwa Anak berumur 18 (delapan belas) Tahun dan hendak dinikahkan dengan RIAN YEHEZKIEL DAUD LINTONG karena Anak sekarang dalam

Halaman 4 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sudah hamil 6 (enam) bulan dari RIAN YEHEZKIEL DAUD LINTONG;

- Bahwa RIAN YEHEZKIEL DAUD LINTONG berusia 21 (dua puluh satu) Tahun dan bekerja sebagai petani yang berpenghasilan mencukupi untuk biaya sehari-hari;
- Bahwa Anak telah tamat Sekolah Menengah Pertama dan akan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa RIAN YEHEZKIEL DAUD LINTONG dan Anak berpacaran sudah 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat mengingat usia kehamilan Anak;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan yang akan dilangsungkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah antara Anak dan Calon Suaminya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari VENNA JEKLIN LENGKEY yang adalah Anak Para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Anak beragama Kristen dan saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Calon Suaminya dan saat ini Anak sedang mengandung bayi dari hasil hubungan dengan Calon Suaminya dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa atas keinginan bersama dan tanpa paksaan dari siapapun, keduanya berniat untuk melakukan perkawinan pada tanggal setelah mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan tidak terikat hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Anak telah siap untuk menjadi istri bagi Calon Suaminya;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suaminya adalah lelaki yang baik dan Anak yakin dapat menjadi seorang kepala keluarga yang baik bagi Anak dan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari RIAN YEHEZKIEL DAUD LINTONG yang adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan beragama Kristen;
- Bahwa ia saat ini bekerja sebagai karyawan Swasta;
- Bahwa ia berpacaran dengan Anak Para Pemohon dan saat ini Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi darinya dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa ia menyayangi Anak Para Pemohon dan berkomitmen akan bertanggungjawab sepenuhnya sebagai suami yang baik nantinya;
- Bahwa pernikahan yang direncanakan adalah atas dasar keinginannya dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan tidak terikat hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua RIAN YEHEZKIEL DAUD LINTONG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah merestui dan sepakat dengan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan diantara anaknya dan Anak Para Pemohon tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa ia berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Para Pemohon yaitu Orang Tua kandung dari VENNA JEKLIN LENGKEY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dengan keluarga RIAN YEHEZKIEL DAUD LINTONG untuk mengawinkan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tersebut;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Amr



- Bahwa Anak Para Pemohon belum pernah dan tidak sedang terikat perkawinan dengan siapa pun dan antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon memberi restu kepada Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya untuk melakukan perkawinan serta berkomitmen akan bertanggungjawab atas ekonomi dan kehidupan rumah tangga keduanya sampai keduanya mapan dan bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya memohon Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang dan sepanjang relevan terhadap pokok perkara, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan dari Para Pemohon adalah agar Anak Pemohon yang bernama VENNA JEKLIN LENGKEY yang berumur 18 (delapan belas) tahun dapat diberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan dan beragama Kristen, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah hadir menghadap dan memberikan keterangannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2)

Halaman 7 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon agar memahami resiko jika terjadinya perkawinan anak terkait dengan keberlanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis Anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan untuk mendapatkan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-14 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang dibawah janji telah menerangkan segala sesuatu yang berdasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Para Pemohon sehingga keterangan Para Saksi dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon dengan didasarkan pada prinsip untuk memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Permohonan Para Pemohon mengenai mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam Permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon mengenai menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama VENNA JEKLIN LENGKEY, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan ayat (2) mengatur bahwa apabila dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka orang tua pihak pria dan / atau orang tua wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5 dan P-9 serta fakta hukum yang terungkap di persidangan berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga apabila akan melakukan perkawinan harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5 serta fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Pemohon adalah orang tua kandung VENNA JEKLIN LENGKEY sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum serta berhak mengajukan Permohonan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat ketentuan yang harus dipenuhi dalam Hakim memberikan dispensasi perkawinan, yaitu :

- Perkawinan yang akan dilakukan adalah atas dasar keinginan Anak dan Calon Pasangannya;
- Perkawinan tersebut telah disetujui dan mendapat izin dari orang tua Anak dan Calon Pasangannya;
- Diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;
- Terdapat alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah berpacaran dan hubungan antara keduanya adalah tanpa paksaan fisik, psikis,

Halaman 9 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksual atau pun ekonomi baik dari salah satu diantara keduanya maupun dari pihak lain sehingga perkawinan yang akan dilakukan semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan keduanya untuk membina rumah tangga *vide* bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan izin dan restu untuk dilakukan perkawinan diantara keduanya *vide* bukti surat P-12;

Menimbang, bahwa diantara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas ataupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan susuan serta tidak mempunyai hubungan yang oleh agama keduanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Anak Para Pemohon sedang mengandung bayi dari Calon Suaminya *vide* bukti surat P-9 sehingga Hakim berkesimpulan telah terdapat alasan yang mendesak untuk dilakukannya perkawinan diantara keduanya demi kebaikan dan kepentingan mereka serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya telah memahami tujuan dari perkawinan dan keduanya telah membina hubungan pacaran sehingga Hakim memandang keduanya dapat berkomunikasi dengan baik guna menjalankan peran sebagai suami dan istri nantinya;

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan Swasta dan ia berkomitmen akan mencari penghasilan tambahan agar kelak dapat bertanggungjawab atas kehidupan Anak Para Pemohon dan bayi dalam kandungan, sehingga Hakim berpendapat Calon Suami Anak Para Pemohon memiliki keseriusan dalam membangun rumah tangga bersama Anak Para Pemohon dan mampu bertanggungjawab atas hidup dan penghidupan Anak Para Pemohon serta bayi dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon juga telah menyatakan komitmen untuk tetap bertanggungjawab atas ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sampai dengan keduanya telah mandiri dan mapan;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) Permohonannya memohon agar Hakim membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sehingga petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama VENNA JEKLIN LENGKEY;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Amurang pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, oleh Anthonie Spilkam Mona. SH., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Amr tanggal 27 September 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh INGRIANY SUPIT, S.H.MH,

Halaman 11 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Ingriany Supit, S.H.MH

Anthonie Spilkam Mona. SH

Perincian biaya

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
1. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
2. Proses	:	Rp 50.000,00;
3. PNBP	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 133/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)